

REFORMASI PERTANIAN DENGAN PARADIGMA BARU

Parlaungan Adil Rangkuti¹

1

Sejak jaman kolonial hingga saat ini, keberadaan petani masih dianggap sebagai factor produksi (produsen), yang terus menjadi sapi perahan (ekosloitasi) bagi pelaku bisnis pertanian yang bergerak pada pengadaan saprodi (sarana produksi), pasca panen dan pemasaran hasil, sehingga petani tak berdaya untuk bergerak dari pola usaha tani tradisional yang bersifat subsisten menuju usaha tani moderen yang bersifat komersial. Petani berada dalam posisi "pasrah" menerima dan mengikuti perilaku dan mekanisme pasar yang belum memihak kepada petani, yang menyebabkan tingkat kehidupan petani relatif statis berada pada lapisan bawah sehingga semakin sulit untuk mampu keluar dari kondisi kemiskinan dan keterbelakangan.

Dalam era presiden Sukarno maupun Suharto, pemerintah telah berusaha membangun pertanian dengan berbagai cara dan dengan dukungan dana yang tidak sedikit, namun nasib petani tidak berubah secara "significant", identitas "wong cilik" tetap melekat pada dirinya dengan tingkat pendapatan yang rendah dibandingkan dengan pada profesi lainnya, terlebih-lebih lagi dalam masa krisis ekonomi sekarang ini keadaan perekonomian petani

semakin tidak menentu. Masyarakat miskin yang saat ini telah mencapai sekitar 40 juta jiwa, sebagian besar adalah petani yang hidup di pedesaan dengan keadaan yang memprihatinkan dalam ancaman kekurangan gizi dan kondisi lingkungan pemukiman yang kurang memadai.

Sebagai negara agraris yang terletak di daerah tropis, masyarakat dunia mengetahui bahwa potensi sumber daya pertanian Indonesia sangat luar biasa dan memiliki keunggulan komparatif serta didukung oleh keuletan petani yang penuh kesadaran dan ketekunan. Potensi daratan dengan luas sekitar 1,9 juta km² dan lautan dengan luas sekitar 3,1 juta km² termasuk landas kontinen, dengan penduduk sekitar 210 juta jiwa dimana sekitar 60% berprofesi tani, sangat sulit diterima akal sehat jika bangsa kita kekurangan pangan dan gizi dengan kondisi petani berada pada kemiskinan dan keterbelakangan yang berkepanjangan. Untuk menanggapi hal ini, "mau tidak mau, suka tidak suka" telah terjadi "mismanagement" pertanian nasional selama ini, yang mendesak agar dilakukan penataan menyeluruh atau reformasi total yang menyangkut konsepsi serta kebijakan makro dan mikro yang menuntut adanya kemauan politik (political will) pemerintah. Dukungan sungguh-sungguh dari para pakar pertanian ditunggu petani dengan penuh

¹ Staf pengajar Jurusan Teknik Pertanian, FATETA-IPB

harapan, kesibukan riset dan dialog ilmiah perlu diseimbangkan dengan penerapannya di lapangan secara nyata dan tepat guna.

Paradigma Baru

Reformasi total di sector pertanian, diperlukan perubahan paradigma yang selama ini pembangunan pertanian masih bersifat statis harus menjadi lebih dinamis melalui upaya optimalisasi pemberdayaan sumber daya petani dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna menuju modernisasi dan menerapkan prinsip-prinsip bisnis menuju profesionalisme dalam memasuki mekanisme pasar global yang mampu bersaing secara sehat. Pembangunan pertanian moderen secara bertahap dan berkelanjutan yang mencakup komoditas pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan hutan produksi tidak lagi dipandang sebagai kegiatan teknis produksi semata, tapi harus dilihat sebagai suatu system agribisnis yang meliputi 4 kelompok kegiatan yaitu: 1) kegiatan pertanahan dan penyediaan saprodi, 2) kegiatan budidaya tanaman (on farm agrobusiness), 3) kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil (off farm agrobusiness) dan 4) kegiatan pendukung berupa layanan dan jasa.

Dengan system agribisnis tersebut, pendekatan sector dalam pembangunan pertanian harus ditinggalkan karena egoisme sektoral yang selama ini terjadi telah menimbulkan ambisi masing-masing sector dengan mempermainkan data

dan program untuk mencapai target-target tertentu agar "bos" senang (asal bapak senang). Pendekatan dari atas (top down) harus dirubah menjadi pendekatan dari bawah (bottom up) dalam satu atap secara terpadu dengan pandangan holistic, menyeluruh dan simultan. Petani sebagai pelaku agribisnis harus menyatu dengan pelaku agribisnis lainnya seperti pengusaha, peneliti, praktisi dan pemerintah sebagai kaum tani Indonesia dalam sinergi kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan.

Tanah sebagai salah satu factor produksi telah mengalami fragmentasi karena adanya system warisan sehingga pemilik lahan per kapita menjadi semakin kecil. Pemilikan lahan dengan luas kurang dari 0,5 ha per kepala keluarga petani semakin meningkat dari waktu ke waktu, dalam sepuluh tahun saja yakni dari 1983 sampai dengan 1993 telah meningkat dari 9,5 juta menjadi 10,9 juta kepala keluarga. Peningkatan jumlah kepala keluarga yang memiliki lahan dengan luas yang semakin kecil memberi implikasi terhadap meningkatnya petani gurem yakni petani yang memiliki lahan sama atau kurang dari 0,25 ha per kepala keluarga.

Dengan pemilikan luas lahan yang relatif kecil dan tersebar dalam berbagai ragam karakteristik wilayah, akan semakin tidak menarik secara ekonomi jika tidak dilakukan manajemen pengelolaan yang lebih baik dan professional. Kondisi ini memberi dampak terhadap produktifitas sector pertanian yang semakin menurun yang ditunjukkan

dengan menurunnya pangsa relatif sector pertanian terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dari 22% pada tahun 1990 menjadi 17% pada tahun 1995, sementara di lain pihak terlihat tenaga kerja nasional yang bekerja di sector pertanian masih sebesar 43% dan yang masih menggantungkan hidupnya di sector pertanian sebesar 53% dari total rumah tangga nasional.

Kebijakan Agribisnis

Untuk membangun pertanian moderen dengan system agribisnis, diperlukan kebijakan agribisnis yang mencakup konsepsi dan strategi menyeluruh sebagai upaya menyusun kembali platform pembangunan perekonomian nasional dengan menggunakan pertanian sebagai basis utama. Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi selama ini, dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok strategis yang perlu dibenahi agar pengembangan agribisnis dapat tumbuh dengan cepat yaitu: 1) penataan lahan dan peningkatan saprodi, 2) pengembangan system informasi bisnis dan teknologi pertanian, 3) pengembangan koperasi agribisnis, 4) penataan system pembinaan petani dan 5) restrukturisasi institusi birokrasi agar lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah kebijakan yang perlu dilakukan terhadap 5 kelompok strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama; untuk mencapai pendayagunaan sumber daya pertanian terutama lahan secara optimal, perlu dilakukan zonase

komoditas unggulan atas dasar kessamaan karakteristik wilayah dalam bentuk Kawasa-kawasan Pengembangan Agribisnis (KPA) yang dituangkan dalam peta pengembangan agribisnis secara nasional. Untuk menentukan skala prioritas pembangunan KPA, perlu dilakukan penetapan quota produksi atas dasar upaya memenuhi kebutuhan domestik dan tujuan ekspor serta pemerataan pembangunan dalam rangka otonomi daerah. Untuk memenuhi saprodi mendukung KPA dan wilayah sekitarnya, pengadaan bibit unggul dan alat/mesin pertanian sangat menentukan disamping pengadaan saprodi lain perlu dilakukan penyempurnaan baik kualitas maupun distribusinya. Pengembangan industri bibit unggul dengan kultur jaringan atau rekayasa genetic dan industri alat/mesin pertanian dalam rangka penerapan mekanisasi pertanian sudah saatnya dilakukan secara selektif.

Kedua; petani sering kesulitan dalam memperoleh informasi bisnis dan teknologi pertanian karena jarak yang relatif jauh dari pusat-pusat informasi tersebut. Kalaupun ada informasi yang mereka peroleh dari masmedia, pada umumnya petani ragu-ragu dalam penerapannya karena resiko yang sangat besar. Untuk menghilangkan kendala tersebut perlu dilakukan upaya jalan pintas (shor cut), agar informasi tersebut dapat diterima petani secara "cepat, tepat, mudah dan murah", melalui lembaga khusus berupa Pusat-pusat Pengembangan Agribisnis (PPA) yang dibangun di

sentra-sentra produksi terutama untuk melayani KPA-KPA dan wilayah sekitarnya. PPA diharapkan menjadi agen pembaharuan (agent of development), sebagai ujung tombak yang menjadi titik temu kaum tani mengembangkan agribisnis secara professional. Peran aktif dari lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui PPA tersebut sehingga ilmu terapan dapat langsung dikembangkan di lapangan dalam rangka percepatan proses alih teknologi di kalangan petani.

Ketiga; untuk mengkoordinasikan dan menerapkan aspek-aspek agribisnis secara terpadu diperlukan wadah bagi petani dan yang tepat saat ini adalah pengembangan koperasi agribisnis dengan skala prioritas ditujukan kepada petani yang berada di wilayah KPA. Keberadaan KUD (Koperasi Unit Desa) dengan sluruh instansi yang terkait dengan KUD perlu ditata kembali, agar tidak menjadi tempat bagi pelaku-pelaku bisnis yang bertindak hanya sebagai mediator dan koruptor yang sangat merugikan petani. Pengembangan koperasi agribisnis dilakukan dengan pendekatan komoditas dan profesionalisme, tidak lagi menggunakan pendekatan kewilayahan dan pendekatan multi usaha seperti yang dilakukan dalam pengembangan KUD selama ini. Untuk membantu permodalan bagi petani melalui koperasi agribisnis perlu dirancang kredit khusus melalui bank khusus dengan pembinaan dan pengawasan yang intensif melalui PPA dengan mengurangi keterlibatan birokrat yang selama ini dirasakan terlalu mendominasi pembinaan petani.

Keempat; pembinaan petani selama ini banyak yang tumpang tindih, dan tidak terfokus kepada kepentingan petani sehingga terjadi pemborosan baik tenaga, waktu dan dana. Semua kegiatan pembinaan petani perlu disempurnakan baik metoda maupun materinya dengan pola "diklatoh" atau pendidikan, pelatihan dan percontohan langsung di lapangan melalui KPA/PPA, dengan prinsip iptek diantar ke desa sesuai dengan kebutuhan pertanian sebagai "problem solving". Melalui KPA/PPA tersebut diharapkan dapat dibangun model-model agribisnis komoditas unggulan tertentu sebagai percontohan bagi kaum tani dengan pengendalian pemerintah dalam hal pemenuhan kuota produksi untuk menghindari terjadinya over produksi yang dapat merugikan petani.

Kelima; keberhasilan reformasi dengan paradigma baru sangat tergantung kepada keberanian dan konsistensi pemerintah melakukan restrukturisasi institusi birokrasi yang selama ini dianggap kurang efektif dan efisien. Institusi yang perlu direstrukturisasi sebagai konsekuensi dari pembaharuan dengan paradigma baru tersebut adalah: 1) memberi kewenangan yang lebih besar kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) yakni setingkat Menteri (Departemen) dan ruang lingkup fungsi lebih luas mencakup hutan negara untuk menangani pertanahan dan agraria melihat kepada permasalahan yang dihadapi yang semakin besar dan kompleks meliputi hak-hak petani atas tanah, sertifikasi, tata ruang, peta komoditas unggulan dan pelestarian sumber daya alam, 2) menempatkan

semua institusi yang terkait dengan pertanian di bawah satu atap yakni Departemen Pertanian termasuk perkebunan dan hutan produksi, sehingga system agribisnis dapat dikelola secara efektif dan efisien, 3) memberi kemandirian dan keleluasaan kepada BPA (Badan Pengembangan Agribisnis) untuk mengembangkan agribisnis melalui PPA pada KPA dan daerah sekitarnya dengan manggalang protensi kaum tani secara terpadu dan professional, 4) memperkuat posisi petani melalui pengembangan koperasi agribisnis terutama pada KPA-KPA dengan memberikan kredit khusus

melalui bank tertentu dan secara bertahap melakukan penataan perkoperasian petani khususnya KUD dan institusi yang terkait agar terfokus kepada penanganan komoditas strategis dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, 5) menata institusi yang bergerak dalam Penelitian dan Pengembangan (R&D), Perguruan Tinggi dan R&D swasta di bidang pertanian agar dapat secara nyata ikut mengembangkan agribisnis melalui penerapan hasil-hasil riset di lapangan melalui KPA/PPA dalam upaya percepatan alih teknologi tepat guna kepada petani.